

ABSTRAK

Program *ULAM SEPAT* yang diterapkan dalam konteks pembuatan e-KTP di Kabupaten Nganjuk merupakan inisiatif yang berupaya memenuhi standar pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Dalam pelaksanaannya, program ini mengedepankan beberapa elemen penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah penyederhanaan prosedur pendaftaran yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pembuatan e-KTP. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis program *ULAM SEPAT* yang diciptakan Kabupaten Nganjuk serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk yang benar sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program *ULAM SEPAT* efektif dalam meminimalisir praktik pungutan liar (pungli) dalam pembuatan e-KTP di Kabupaten Nganjuk. Program ini berhasil meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang terlihat dari penurunan signifikan dalam jumlah pengaduan terkait pungli dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melaksanakan kampanye sosialisasi yang lebih luas dan terarah mengenai program ini, agar masyarakat lebih memahami prosedur dan hak-hak mereka. Penggunaan media massa, media

sosial, dan forum komunitas dapat menjadi sarana efektif dalam menyebarkan informasi.

Kata kunci : *Ulam Sepat*, Pemungutan Liar, Kartu Tanda Penduduk.

ABSTRACT

The ULAM SEPAT program implemented in the context of making e-KTP in Nganjuk Regency is an initiative that seeks to meet the standards of public service regulated in Law No. 25 of 2009. In its implementation, this program prioritizes several important elements that aim to improve the quality of service to the community. One of them is the simplification of registration procedures that make it easier for the community to access e-KTP making services. The purpose of this study is to analyze the ULAM SEPAT program created by Nganjuk Regency and to increase public awareness of the rights and procedures for making a correct Population Identity Card according to Law No. 25 of 2009 concerning Public Services. This type of research uses an empirical legal research method or an empirical juridical research method. In this study, the author uses a qualitative approach, namely a method of analyzing research results that produces descriptive analysis data. Data collection techniques in this study use observation, interview and documentation techniques. The results of this study indicate that the ULAM SEPAT Program is effective in minimizing the practice of extortion (pungli) in making e-KTP in Nganjuk Regency. The program has successfully increased transparency, accountability, and community participation, as seen from a significant decrease in the number of complaints related to extortion and an increase in community satisfaction with services. Further researchers are advised to carry out a broader and more targeted socialization campaign regarding this program, so that the community better understands the procedures and their rights. The use of mass media, social media, and community forums can be effective means of disseminating information.

Keywords: Ulam Sepat, Illegal Collection, Resident Identity Card.